

BAB III

DESKRIPSI TPLA DAN PELAKSANAAN PLA

3.1. Sejarah Singkat TPLA

Pemerintah Kota Tasikmalaya terbentuk dengan keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 17 Oktober 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya dengan luas wilayah 17.156,20 Ha atau 171,56 KM², yang meliputi 8 (delapan) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Cipedes, Cihideung, Tawang, Tamansari, Mangkubumi, Kawalu, Indihiang dan Cibeureum dengan jumlah Kelurahan 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan.

Tabel II

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Kelurahan
1.	Cihideung	5,30	6
2.	Cipedes	8,10	4
3.	Tawang	5,33	5
4.	Indihiang	30,10	13
5.	Kawalu	41,12	10.
6.	Cibeureum	29,41	15
7.	Tamansari	28,52	8
8.	Mangkubumi	23,68	8
Jumlah		171,56	69

*Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Wilayah
Administratif Kelurahan*

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika pemerintahan maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat maka pada tanggal 19 Mei 2008 disahkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Cibeureum

Tabel III

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Kelurahan
1.	Cihideung	5,30	6
2.	Cipedes	8,10	4
3.	Tawang	5,33	5
4.	Indihiang	11,88	6
5.	Bungursari	18,22	7
6.	Kawalu	41,12	10
7.	Cibeureum	17,54	9
8.	Purbaratu	11,87	6
9.	Tamansari	28,12	8
10.	Mangkubumi	23,68	8
Jumlah		171,56	69

*Luas Wilayah Administratif Kecamatan dan Jumlah Wilayah Administratif Kelurahan
Setelah Pemekaran*

Dengan jumlah penduduk sampai dengan bulan September berdasarkan data Dinas Kependudukan, KB dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya berjumlah 588.229 jiwa terdiri dari 299.174 jiwa laki-laki dan 289.055 jiwa perempuan dan jumlah kepala Keluarga 148.199 KK

Tabel IV.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Cihideung	69.970	16.714
2.	Cipedes	67.771	17.434
3.	Tawang	64.489	17.863
4.	Indihiang	40.385	9.979
5.	Kawalu	80.469	21.980
6.	Cibeureum	55.428	13.190
7.	Mangkubumi	75.339	18.028
8.	Tamansari	56.991	14.442
9.	Bungursari	40.276	9.984
10.	Purbaratu	36.113	8.585
	Jumlah	575.078	149.199

*Sebaran Penduduk dan Kepala Keluarga Per Kecamatan di Kota
Tasikmalaya Tahun*

3.2. Profil Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya

Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya terbentuk pada tahun 2004 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2003.

Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya saat ini berlokasi di Kompleks Bumi Resik Indah Jalan Boulevard Nomor 1 Tasikmalaya, dengan menempati lahan seluas 1.425 M² dan luas bangunan 600 M² yang telah bersertipikat Hak Pakai atas nama BPN-RI.

Jumlah pegawai Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya adalah 47 orang ditambah oleh tenaga Sukwan yang direkrut dari masyarakat sekitar Tasikmalaya yang ditempatkan pada masing-masing Seksi sesuai kemampuannya.

Tabel V

Uraian	Struktural	Staf
Kakan	1	-
TU	3	4
SP & P	3	8
HT & PT	5	14
PPP	3	-
PPPM	3	-
SKP	3	-
Jumlah	21	26

Kepegawaian

Sekalipun Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya baru berdiri tahun 2004 namun dibidang pelayanan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan tetap mendukung Program Pembangunan Pertanahan atau Reforma Agraria yang sedang dilaksanakan dan dikembangkan oleh BPN-RI. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya untuk mendukung program Reforma Agraria adalah melalui peningkatan percepatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat

dengan diluncurkannya Program SAS dan Larasita. Adapun pengadaan kendaraan dan perangkatnya berasal dari Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hasil kerjasama Pemda dan DPRD Kota Tasikmalaya yang pada saat ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

SAS (Stand Alone System) adalah suatu program komputerisasi aplikasi mandiri yang mempunyai fungsionalitas untuk mengelola data (input dan pemeliharaan data dimana produk akhir aplikasi ini antara lain Gambar Ukur (SU) Peta Pendaftaran, Buku Tanah/Sertipikat, Surat Ukur (SU), dalam format cetakan (hardcopy dan softcopy). Adapun jumlah computer yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 24 unit, yang sebagian besar telah dioperasikan.

3.3. Susunan dan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan

Kantor pertanahan terdiri dari :

- a) Sub bagian tata usaha
- b) Seksi survey pengukuran dan pemetaan
- c) Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah
- d) Seksi pengaturan dan penataan pertanahan
- e) Seksi pengendalian dan pemberdayaan.
- f) Seksi sengketa, konflik dan perkara
- g) Struktur Organisasi

3.4. Deskripsi Kerja Setiap Bidang

Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal badan pertanahan nasional di kabupaten atau kota yang berada di bawah yang bertanggung jawab kepada kepala badan pertanahan nasional melalui kepala Kanwil BPN. Kantor pertanahan di pimpin oleh seorang kepala. Yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan pertanahan nasional di kabupaten atau kota yang bersangkutan.

3.4.1. Fungsi Kantor Pertanahan :

1. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan.
2. Pelayanan, perizinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan.

3. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan dasar, pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survey potensi tanah.
4. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform , konsolidasi tanah, dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil , perbatasan, dan wilayah tertentu.
5. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah , pendaftaran hak tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah.
6. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.
8. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah.
9. Pengelolaan system informasi manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS).
10. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta.
11. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan.
12. Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang – undangan serta pelayanan pertanahan

3.4.2. Tugas Setiap Bidang

Kantor pertanahan terdiri dari :

1. Sub bagian tata usaha
2. Seksi survey pengukuran dan pemetaan
3. Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah
4. Seksi pengaturan dan penataan pertanahan
5. Seksi pengendalian dan pemberdayaan.
6. Seksi sengketa, konflik dan perkara

- 1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi kantor pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang – undangan.
- 2) Seksi survey pengukuran dan pemetaan mempunyai tugas pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang baru yang letaknya saling berbatasan atau terpecar dalam satu desa atau kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah.
- 3) Seksi hak tanah dan pendaftaran tanah mempunyai tugas Pendataan dan penertiban tanah bekas, tanah hak. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan.
- 4) Seksi pengaturan dan penataan pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilyah pesisir,pulau – pulau kecil , perbatasan dan wilayah tertentu lainnya.
- 5) Seksi pengendalian dan pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanahNegara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat.
- 6) Seksi sengketa, Konflik dan Perkara mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa,konflik dan perkara pertahanan.

3.4.3.Deskripsi kegiatan PLA

Kegiatan PLA merupakan suatu langkah untuk memahami atau mematangkan pembelajaran yang telah di kaji dalam teori dengan demikian adanya PLA sangatlah membantu penulis memahaminya dalam dunia kerja atau lapangan. Sesuai kajian yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Tasikmalaya. Penulis memahami system kerja BPN kota tasikmalaya. Baik kerja outdoor maupun indoor BPN itu sendiri.Untuk kegiatan PLA yang penulis lakukan lebih memprioritaskan dalam pengukuran dan pengolahan data hasil ukur. Untuk pertama kalinya penulis mengikuti prosedur yang telah BPN terapkan sesuai dengan pengkajian penulis yaitu kegiantan pengukuran. Di BPN kota Tasikmalaya itu sendiri,pengukuran BPN yang hanya mencari luasan suatu

wilayah. dikarenakan BPN adalah sebuah instansi yang mempunyai tugas atau peranan penting mencantumkan suatu luas tanah yang terdapat dalam sertifikat yang resmi.

3.5. Jadwal Kerja Kegiatan PLA

a) Tempat dan waktu

Kegiatan PLA selama kurang lebih 13 minggu terhitung mulai dari tanggal 8 Pebruari 2011 hingga 8 Mei 2011 di kantor Badan Pertanahan Nasional kota Tasikmalaya.

Yang informasinya sebagai berikut :

Alamat : Kompleks Bumi Resik Indah Jalan Boulevard
Nomor 1 Tasikmalaya
Telp : (0265) 323267
Website : kotatasik@bpn.go.id

b) Objek Kerja

Selama kurang lebih 3 bulan penulis melakukan praktik di subseksi pengukuran dan pemetaan dengan perincian sebagai berikut :

Untuk Juru ukur/surveyor :

- a. Pengukuran di lapangan
- b. Pembuatan sketsa
- c. Pengolahan data ukur secara manual

3.6. Hambatan dan Keberhasilan

3.6.1. Hambatan

1. Aspek Organisasi

Pada aspek organisasi ini hambatan yang penulis alami yaitu kurangnya koordinasi antar subseksi. Dan juga antara staff dengan manajemen kurang menjalin hubungan yang harmonis sehingga mengakibatkan kurang lancarnya oprasional kerja.

2. Aspek Oprasional

Dalam aspek ini penulis menemui hambatan, yaitu kurang lengkapnya peralatan baik itu di grafikal ataupun di pengukuran .

Di grafikal komputer - komputer yang digunakan dalam proses pembuatan masih kurang lengkap baik software ataupun hardware , alat ukur pun masih sangat terbatas sehingga pengukuran pun akan sangat terasa memakan waktu. Ketiadaan peta dasar sebagai acuan untuk melaksanakan suatu kegiatan terutama pelaksanaan pengukuran menjadi kendala tersendiri apalagi bila dikaitkan dengan kurangnya titik dasar teknis orde 3, idealnya untuk wilayah seluas kota Tasikmalaya harus tersedia 7 titik. Saat ini terdapat 4 titik yang baru terpasang pada tahun 2008

3. Aspek Personalia

Hambatan yang amat terasa adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, ketiadaan peta dasar/peta kerja/peta pendaftaran juga belum tercukupinya titik dasar teknis baik untuk orde 3 maupun orde 4. Pegawai pada kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya dari 47 orang pegawai 21 diantaranya adalah pejabat structural, 26 pegawai yang ada berusia rata-rata diatas 40 tahun.

3.6.2. Keberhasilan

1. Aspek Organisasi

Keberhasilan yang penulis peroleh selama praktik dalam aspek organisasi yaitu penulis benar – benar mengetahui organisasi di kantor pertanahan yang sebenarnya , membentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan, proses kerja mengenai tugas dan tanggung jawab kami di kantor pertanahan, mengetahui system kerja baik dari sisi atasan maupun bawahan.

2. Aspek Oprasional

Dalam aspek oprasional ini penulis dapat meningkatkan kemampuan keterampilan dalam bekerja , peningkatan pengetahuan mengenai prosedur kerja dan pengoprasian alat ukur, peningkatan percaya diri dalam mengenai konsumen dan bekerjasama baik itu dengan atsan ataupun bawahan.

3. Aspek Personalia

- 1) Tumbuhnya rasa kepercayaan diri dan peningkatan etos kerja .
- 2) Peningkatan kemampuan keterampilan dalam bekerja
- 3) Peningkatan wawasan dan kemampuan
- 4) Peningkatan rasa tanggung jawab, disiplin, team work dalam bekerja.

3.7. Pembimbingan

Pembimbingan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pembimbingan dengan pembimbing dari pihak BPN dan pembimbing dari pihak Prodi. Bimbingan dengan pembimbing dari BPN yaitu menjelaskan teknis cara pengukuran di lapangan dan cara pengolahan data, misalkan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran jarak datar dengan menggunakan pita ukur atau dengan menggunakan alat ukur theodolite, serta menerangkan cara melakukan pengolahan data hasil pengukuran di lapangan hingga menjadi peta bidang. Sedangkan bimbingan dengan pembimbing dari Prodi, yaitu bimbingan mengenai pembuatan laporan hasil dari Pendidikan Luar Akademik (PLA). Kedua bimbingan dilakukan secara rutin tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan saat menjalani PLA.